

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP
SIKAP DISIPLIN PADA SISWA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PLUS AL AMANAH SUMBERTLASEH KECAMATAN DANDER
KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

OLEH
AHMAD SYAIFUDIN
NIM 15220002



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
IKIP PGRI BOJONEGORO
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA TERHADAP
SIKAP DISIPLIN PADA SISWA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PLUS AL AMANAH SUMBERTLASEH KECAMATAN DANDER
KABUPATEN BOJONEGORO**

Oleh

AHMAD SYAIFUDIN

NIM: 15220002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 19 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima
sebagai kelengkapan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan

Dewan Penguji

Ketua	: Drs. Heru Ismaya, M.H.	(.....)
Sekretaris	: Ernia Duwi Saputri, S.Pd., M.H	(.....)
Anggota	: 1. Dr. Ahmad Hariyadi, M.Pd.	(.....)
	2. Drs. Heru Ismaya, M.H.	(.....)
	3. Ali Mujahidin, S.Pd.,M.M.	(.....)

Mengesahkan:
Rektor,



Drs. Sujiran, M.Pd
NIDN. 0002106302

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dimana bangsa yang besar pasti mempunyai dasar atau pondasi yang kuat dan kokoh, Bangsa Indonesia ini mempunyai dasar yang dijadikan sebagai Ideologi, Pandangan hidup atau *way of life*. Disamping itu juga sebagai alat pemersatu Bangsa Indonesia. Ideologi itu dinamakan Pancasila, Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia didalam Pancasila itu sendiri terdapat (lima) 5 sila yang dimana disetiap sila-sila dari Pancasila tersebut mengandung makna dan arti yang sangat penting untuk di hayati dan diamalkan dalam kehidupan rakyat Indonesia untuk menjaga kesatuan NKRI agar tidak terpecah belah meskipun berbeda-beda keyakinan, budaya, dan lain sebagainya yang tercermin dalam Bhieneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Dari sila-sila Pancasila tersebut mengandung nilai-nilai kehidupan sosial, budaya, politik, keagamaan, kesopanan, kejujuran, dan disiplin yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ani Sri Rahayu, (2013: 23), nilai-nilai yang terkandung dalam sila I sampai dengan sila ke V Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Sejak dahulu kala nilai-nilai itu

selalu didambakan, dicita-citakan bangsa Indonesia agar terwujud dalam masyarakat yang adil dan makmur.

Menurut Kaelan, (2010: 23), bangsa Indonesia dalam hal ini merupakan pendukung nilai-nilai (*subscriber of value*) Pancasila. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatuan, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia itulah yang mengakui, menghargai, menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai.

Nilai yang terkandung dan yang harus dilaksanakan setiap rakyat Indonesia merupakan salah satu pencerminan dari pada Nilai-nilai Pancasila. Sikap disiplin ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi ini masih banyak kita jumpai pergeseran budaya atau culture sehingga terjadinya sikap disiplin itu sendiri mulai luntur dikalangan masyarakat Indonesia khususnya pada pelajar atau siswa sekolah. Seorang pelajar atau siswa sekolah dituntut harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi, baik itu disiplin dalam mentaati segala tata tertib sekolah, disiplin dalam bertingkah laku dan lain-lain, agar menjadi generasi muda yang berkarakter atau berjiwa Pancasila.

Disiplin adalah kekuatan yang ditanamkan oleh para pendidik untuk menanamkan dalam jiwa tentang tingkah laku dalam pribadi siswa dan bentuk kebiasaan dalam diri mereka, tunduk dan patuh dengan sebenarnya pada aturan-aturan yang sesuai dengan prinsip pendidikan yang sesungguhnya yaitu inti yang dijalankan pada setiap aktivitas sekolah.

Sikap disiplin dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, teman, keluarga ketiga aspek ini sangat berpengaruh dalam memberikan sikap disiplin pada siswa, kalau ketiga aspek ini baik maka sikap disiplin siswa itu juga akan baik, tetapi apabila ketiga aspek ini buruk maka yang terjadi adalah sebaliknya. Oleh karena itu ketiga faktor diatas harus diperhatikan secara serius guna untuk mencetak siswa yang memiliki sikap disiplin di sekolah maupun disiplin dalam hal-hal lainnya.

Akhir-akhir ini banyak siswa yang tidak menerapkan sikap disiplin salah satu contoh kecil yaitu ketika berangkat sekolah tidak tepat pada waktunya, siswa banyak yang membolos ketika jam belajar, menyontek saat ujian, tidak mengerjakan tugas, berkelahi dan lain-lain. Disinilah peran seorang guru dituntut dalam menerapkan sikap disiplin pada siswa. Yaitu dengan memberikan contoh atau perilaku yang disiplin dalam mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Supaya siswa juga mempunyai kedisiplinan yang tinggi.

Untuk menerapkan sikap disiplin pada siswa, guru dan orang tua harus bekerjasama dalam mengawasi sikap atau tingkah laku anaknya. Untuk mencetak siswa yang memiliki sikap disiplin yang tinggi dengan cara mengajarkan atau memberikan contoh disiplin baik disiplin dalam berbicara, Tingkah laku dan lain sebagainya. Agar siswa dapat meniru perilaku yang telah dicontohkan itu, Sehingga kebiasaan-kebiasaan disiplin akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Disamping orang tua dan guru memberikan contoh yang baik pada siswa maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya perilaku yang negatif atau perilaku yang tidak disiplin. Salah satu upaya tersebut adalah menerapkan peraturan yang tegas, memberikan hukuman yang tetap, memasukkan sikap-sikap disiplin dalam proses belajar mengajar baik intrakurikuler atau ekstrakurikuler, pemberian penghargaan dan sebagainya. Artinya dengan adanya upaya-upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan sikap disiplin pada siswa.

Sikap disiplin pada sekolah bertujuan untuk mencetak siswa yang mempunyai karakter yang tecantum di dalam nilai-nilai pancasila diantaranya untuk menjadikan generasi muda yang bermoral, berprestasi, beriman, berprestasi dan bersikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan adanya penerapan-penerapan nilai-nilai disiplin diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku siswa yang baik.

Berdasarkan uraian, maka peneliti fokus pada bagaimana implementasi nilai-nilai pancasila terhadap sikap disiplin siswa, disamping itu peneliti juga membatasi masalah dalam penelitian ini supaya pembahasan tidak meluas atau melebar, karena di dalam penelitian ini peneliti hanya ingin mengetahui implementasi nilai-nilai pancasila terhadap sikap disiplin pada siswa.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai penerapan nilai-nilai disiplin di sekolah SMP Plus Al Amanah Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, karena masih

banyak siswa dari SMP Plus Al Amanah ini belum menerapkan sikap disiplin baik ketika masuk sekolah, ketika memakai atribut sekolah dan lain-lain, disamping itu juga banyak siswa yang membolos ketika jam pelajaran berlangsung dengan menyetengahkan judul “Implementasi Nilai-nilai Pancasila Terhadap Sikap Disiplin Pada Siswa di SMP Plus Al Amanah Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas peneliti mengambil rumusan masalah yaitu:

Bagaimana implementasi nilai-nilai pancasila terhadap sikap disiplin pada siswa di SMP Plus Al Amanah Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai pancasila terhadap sikap disiplin pada siswa di SMP Plus Al Amanah Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah Untuk memberikan informasi kepada pihak sekolah baik kepada siswa, guru dan kepala sekolah tentang implementasi nilai-nilai pancasila terhadap sikap disiplin siswa yang kedepannya bisa menjadi pemicu semangat untuk lebih baik lagi dalam menerapkan nilai-nilai itu sendiri.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
2. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang bersifat pancasila yaitu menggunakan prinsip filosofi bahwa negara berketuhanan, berkemanusiaan, bersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan, maka negara tersebut pada hakekatnya menggunakan dasar filsafat dari sila-sila pancasila.
3. Sikap Disiplin adalah Tindakan seseorang yang taat dan patuh terhadap aturan dan tata tertib yang ada.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan apabila sudah dianggap sesuai. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.(Usman, 2002:70).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”(Setiawan, 2004:39).

B. Tinjauan Tentang Nilai-nilai Pancasila

1. Pengertian Nilai

(Kokom Komalasari, 2002: 54-58), menyebutkan bahwa nilai atau dalam kosakata bahasa Inggris disebut value termasuk salah satu bidang kajian filsafat. Persoalan- persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari dalam salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai (*axiology, theory of value*). Filsafat juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya keberhargaan atau kebaikan. Selain itu, istilah nilai juga untuk menunjukkan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Di dalam *Dictionary of sociology and Related sciences* dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai ada dan melekat pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Dengan demikian, secara sederhana nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap berharga dan berguna bagi kehidupan manusia serta dianggap baik.

Dalam pandangan filsafat, sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar, indah, baik, religius dan sebagainya. Nilai itu bersifat ideal. Sebagai sesuatu yang abstrak nilai tidak dapat disentuh oleh panca indera. Panca indera hanya dapat menangkap benda atau tingkah laku yang mengandung nilai tersebut. Berkaitan dengan hal itu, ada dua pandangan tentang keberadaan nilai, yaitu:

- 1) Nilai sebagai sesuatu yang ada pada objek itu sendiri (Pandangan Objektif). Menurut pandangan ini, nilai merupakan suatu hal yang objektif dan membentuk semacam *dunia nilai* yang menjadi

ukuran tertinggi dari perilaku manusia. Pandangan ini dikemukakan oleh Max Scheler dan Nocolia Hartman.

- 2) Nilai sebagai sesuatu yang bergantung pada penangkapan dan perasaan orang (Pandangan Subjektif). Menurut pandangan ini, nilai yang dimaksud adalah tingkat atau derajat yang diinginkan oleh manusia. Nilai merupakan tujuan dari kehendak manusia yang benar dan ditata menurut susunan tingkatannya dimulai dari bawah yaitu: nilai hedonis (kenikmatan), nilai utilitaris (kegunaannya), nilai biologis (kemulian), nilai diri estetis (keindahan, kecantikan), nilai-nilai pribadi (sosial), dan yang paling atas dan paling tinggi tingkatannya adalah nilai religious (kesucian). Pandangan ini dikemukakan oleh Nietzsche dalam (Kokom Komalasari, 2007: 55).

Berdasarkan kedua pandangan diatas, dapat dikatakan bahwa nilai bukanlah keinginan, tetapi ada yang diinginkan. Artinya, nilai itu bukan hanya diharapkan tetapi diusahakan sebagai suatu yang pantas dan benar bagi diri sendiri dan orang lain. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk mengatasi kemauan pada saat dan situasi tertentu itulah yang dimaksud dengan nilai. Selain itu, nilai juga merupakan suatu bentuk perasaan-perasaan tentang apa yang diinginkan atau tidak diinginkan yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Nilai bukanlah tentang soal benar dan salah, tetapi soal dikehendaki atau tidak, disenangi atau tidak. Nilai merupakan kumpulan sikap dan perasaan yang selalu diperlihatkan melalui perilaku oleh manusia.

Nilai erat kaitanya dengan kebudayaan dan masyarakat. Setiap masyarakat atau setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai tertentu mengenai sesuatu. Koentjaraningrat dalam (Kokom Komalasari, 2007: 55) berpendapat bahwa suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan bagi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, nilai berdasarkan cirinya dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, nilai-nilai yang mendarah daging (*internalized value*), yaitu nilai yang telah menjadi kepribadian bawah sadar atau yang mendorong timbulnya tindakan tanpa berpikir panjang lagi. Bila dilanggar, timbul perasaan malu atau bersalah yang mendalam. Kedua, nilai dominan, yaitu nilai yang dianggap lebih penting dari pada nilai-nilai lainnya.

Beberapa pakar mengidentifikasi klasifikasi yang selama ini tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Max Scheler dalam (Kokom Komalasari 2007: 55-56), mengklasifikasikan nilai berdasarkan tingkatannya, yaitu:

1) Nilai-nilai Kenikmatan

Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai yang mengenakan, yang menyebabkan orang merasakan senang atau menderita.

2) Nilai-nilai Kehidupan

Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, misalnya kesehatan, kesegaran jasmani dan kesejahteraan umum.

3) Nilai-nilai Kejiwaan

Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani atau lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.

4) Nilai-nilai Kerokhanian

Dalam tingkatan ini terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Walter G. Everet dalam (Kokom Komalasari 2007: 56), mengklasifikasikan nilai-nilai manusiawi kedalam delapan kelompok, yaitu:

1. Nilai-nilai ekonomis
2. Nilai-nilai kejasmaniaan
3. Nilai-nilai hiburan
4. Nilai-nilai sosial
5. Nilai-nilai watak
6. Nilai-nilai estetis
7. Nilai-nilai intelektual
8. Nilai-nilai keagamaan

Notonagaro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu:

1. Nilai Material

Yaitu Segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia.

2. Nilai Vital

Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktifitas.

3. Nilai Kerokhanian

Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia.

Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas 4 macam:

- a. Nilai Kebenaran, yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
- b. Nilai Keindahan atau Nilai Estetis, yang bersumber pada unsur kehendak manusia.
- c. Nilai Kebaikan atau Nilai Moral, yang bersumber pada unsur kehendak manusia.
- d. Nilai Religius, yang merupakan kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia.

Dari uraian mengenai klasifikasi nilai diatas, dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang berwujud material saja, akan tetapi juga sesuatu yang berwujud non-material atau immaterial. Bahkan sesuatu yang immaterial ini dapat mengandung nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material relatif lebih mudah diukur, yaitu dengan menggunakan panca indera ataupun alat pengukur. Sedangkan nilai kerohanian lebih sulit mengukurnya. Dalam menilai hal-hal kerohanian yang menjadi alat ukurnya adalah hati nurani yang dibantu oleh panca indera, cipta, rasa, karsa dan keyakinan manusia.

Kemudian dalam kaitannya dengan penjabarannya, nilai dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Nilai dasar, yaitu berupa hakekat, esensi, intisari atau makna yang terkandung dalam nilai-nilai tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal,

karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu. Misalnya, hakekat tuhan, manusia dan makhluk lainnya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila berkedudukan sebagai nilai dasar yang menjadi sumber etika dalam kehidupan setiap rakyat Indonesia.

2. Nilai instrumental, yaitu nilai yang pedoman pelaksanaannya dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila nilai dasar tersebut belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai tersebut akan menjadi norma moral. Akan tetapi jika nilai instrumental itu merupakan suatu arahan kebijakan yang bersumber pada nilai dasar. Sehingga nilai instrumental dapat dikatakan sebagai eksplisitasi dari nilai dasar. Dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. Nilai instrumental dapat kita temukan dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan penjabaran dari Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian tanpa pasal-pasal UUD 1945, Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila belum memberikan makna yang konkret dalam praktek ketatanegaraan kita.
3. Nilai praksis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praksis dijiwai oleh Nilai-nilai dasar dan instrumental. Dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, nilai-nilai praksis dapat kita temukan didalam semua peraturan perundang-undangan yang tingkatannya dibawah UUD 1945 atau yang sering kita

sebut dengan *undang-undang organik* meliputi Ketetapan MPR, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), dan Peraturan Daerah (Perda).

2. Pengertian Pancasila

Istilah “Pancasila” telah dikenal di Indonesia sejak zaman majapahit abad XIV, yaitu terdapat pada buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dan baru dikenal bangsa Indonesia sejak tanggal 1 Juni 1945, yaitu pada waktu Ir. Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Dari Segi Etimologi Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya Panca = Lima dan Sila / syila = batu sendi, ulas atau dasar. Jadi, Pancasila adalah lima dasar.

Menurut (Saronji Dahlan, 2006: 3), Pancasila adalah gabungan dari kata panca dan sila. Panca mempunyai arti lima, dan Sila artinya dasar. Pancasila berarti lima dasar yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila yang sah sebagai Negara Indonesia termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia keempat.

Menurut penulis pancasila adalah dasar suatu bangsa yang dijadikan ideologi atau pandangan hidup, yang mana didalam pancasila itu sendiri mengandung nilai-nilai aspek kehidupan.

3. Pengertian Nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari kehidupan manusia di wilayah Indonesia sejak zaman prasejarah hingga zaman kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan lain-lain. Menurut (Kaelan dkk, 2010: 26), nilai-nilai Pancasila adalah bersifat objektif dan juga subjektif. Artinya esensi nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Sehingga dimungkinkan dapat diterapkan pada negara lain walaupun barangkali namanya bukan Pancasila. Artinya jikalau suatu negara menggunakan prinsip filosofi bahwa negara berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan, maka negara tersebut pada hakekatnya menggunakan dasar filsafat dari sila-sila Pancasila.

Menurut (Kaelan dkk 2010: 27), nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri sebenarnya hakikat maknanya yang terdalam menunjukkan adanya sifat-sifat yang umum universal dan abstrak, karena merupakan suatu nilai.
2. Nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia dan mungkin juga pada bangsa lain baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, kenegaraan maupun dalam kehidupan keagamaan.
3. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan suatu sumber hukum positif di Indonesia.

Sebaliknya menurut Ani Sri Rahayu, (2013: 28), nilai-nilai subjektif Pancasila dapat diartikan bahwa keberadaan Nilai-nilai Pancasila itu

bergantung atau terletak pada bangsa Indonesia sendiri. Pengertian itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis. Nilai-nilai tersebut sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia.
2. Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis dan nilai-nilai religius, yang manifestasinya sesuai dengan budi nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa.

Nilai-nilai Pancasila itu bagi bangsa Indonesia menjadi landasan, dasar serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam kehidupan kenegaraan. Dengan perkataan lain bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan *das Sollen* atau cita-cita tentang kebaikan yang harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan atau *das Sein*.

4. Kesatuan Sila-Sila Pancasila yang Saling Mengisi dan Saling Mengkualifikasi

Menurut Ani Sri Rahayu, (2013: 12-13), Sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam rangka hubungan hierarkhis piramida. Tiap-tiap sila dikualifikasi oleh empat sila lainnya. Untuk kelengkapan dari hubungan

kesatuan keseluruhan dari sila-sila pancasila dipersatukan dengan rumus hierarkhis tersebut diatas.

a. Sila Pertama

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Sila Kedua

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Sila Ketiga

Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

d. Sila Keempat

Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permasyarakatan/ Perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang

berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

e. Sila Kelima

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu persatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. (Notonagaro dalam Ani Sri Rahayu, 2013: 13)

5. Makna Nilai-nilai Setiap Sila Pancasila

Menurut (Kaelan dkk 2010: 31-36), sebagai suatu dasar filsafat negara maka sila-sila pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung Nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya namun kesemua itu tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Oleh karena itu meskipun dalam uraian berikut ini menjelaskan Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila, namun ke semuanya itu tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan sila-sila lainnya. Konsekuensinya realisasi setiap sila atau derivasi setiap sila senantiasa, dalam hubungan yang sistematis dengan sila-sila lainnya. Hal ini berdasarkan pada pengertian bahwa makna sila-sila pancasila senantiasa dalam hubungannya sebagai sistem filsafat. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ketuhanan yang maha esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawatan tujuan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa. Oleh karena itu segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai Nilai-nilai Yang Maha Esa.

Demikianlah kiranya Nilai-nilai etis yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dengan sendirinya sila pertama tersebut mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam sila kemanusiaan terkandung Nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai

mahluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak- hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang- undangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani umumnya manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya bermoral dan beragama.

Dalam kehidupan kenegaraan harus senantiasa dilandasi oleh moral kemanusiaan antara lain dalam kehidupan pemerintahan negara, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta dalam kehidupan keagamaan. Oleh karena itu dalam kehidupan bersama dalam negara harus dijiwai oleh moral kemanusiaan untuk saling menghargai sekalipun terdapat suatu perbedaan karena hal itu merupakan suatu bawaan kodrat manusia untuk saling menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Hal ini mengandung suatu pengertian suatu pengertian

bahwa hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensinya nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil dan beradab adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat tanpa membeda-bedakan suku, ras, keturunan, status sosial maupun agama. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap sesama manusia, menjunjung tinggi Nilai-nilai kemanusiaan (Darmodihardjo dalam Kaelan, 2010: 33). Demikianlah kemudian berikutnya Nilai-nilai tersebut harus dijabarkan dalam segala aspek kehidupan negara termasuk juga dalam berbagai kebijakan negara sebagai realisasi pembangunan nasional.

c. Persatuan Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab serta mendasari dan dijiwai sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa

Negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup bersama diantara elemen- elemen yang membentuk negara yang berupa ras, suku, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Oleh karena itu perbedaan adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam satu persatuan melainkan yang dilukiskan dalam suatu seloka Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukannya untuk diruncingkan untuk menjadi konflik dan permusuhan melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai bangsa.

Negara mengatasi segala paham golongan, etnis, suku, ras, individu maupun golongan agama. Mengatasi dalam arti memberikan wahana atas tercapainya harkat dan martabat seluruh warganya. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, maupun golongan agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang integral. Oleh karena itu tujuan negara dirumuskan untuk melindungi segenap warganya dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan warganya serta kaitannya dengan pergaulan dengan bangsa- bangsa lain di dunia untuk mewujudkan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Nilai Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hali ini terkandung nilai bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religius. Yaitu nasionalisme yang bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa, nasionalisme yang humanistik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu Nilai-nilai nasionalisme ini harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara termasuk dalam era reformasi dewasa ini. Proses reformasi tanpa mendasarkan pada moral Ketuhanan, Kemanusiaan dan memegang teguh persatuan dan kesatuan, maka bukan tidak mungkin akan membawa kehancuran bagi bangsa Indonesia seperti halnya telah terbukti pada bangsa lain misalnya Yugoslavia, Srilangka dan lain sebagainya.

d. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan didasari oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab serta Persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikat rakyat adalah merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah negara. Rakyat adalah merupakan subjek pendukung

pokok negara. Negara adalah dari oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu rakyat adalah merupakan asal mula kekuasaan negara. Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Maka Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila kedua adalah (1) adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, (3) menjamin dan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama, (4) mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia,(5) mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku, maupun agama, (6) mengarahkan perbedaan dalam suatu klerjasama kemanusiaan yang beradab, (7) menjunjung tinggi atas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab, (8) mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial atar tercapainya tujuan bersama.

Demikianlah Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Seterusnya Nilai-nilai tersebut di kongkritisasikan dalam kehidupan bersama yaitu kehidupan yang kenegaraan baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun maupun aspek hukum dan perundang- undangan.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Dalam sila kelima tersebut terkandung Nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka di dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud kehidupan kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Konsekuensinya Nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi (1) keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. (2) keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. (3) keadilan kumulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula Nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

6. Nilai-Nilai Yang Terkandung Didalam Pancasila

Menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, (2014:6). Menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila yaitu sebagai berikut:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

- 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaanya dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama anatra pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
 - 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - 6) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
 - 7) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing
 - 8) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.
- b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
- 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
 - 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
 - 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
 - 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
 - 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
 - 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
 - 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

- 8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
 - 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
 - 10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
- c. Persatuan Indonesia
- 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
 - 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
 - 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 - 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
 - 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
 - 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
 - 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

- 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
 - 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
 - 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
 - 6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
 - 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
 - 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
 - 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
- e. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan.
 - 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 - 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
 - 4) Menghormati hak orang lain.

- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- 9) Suka bekerja keras.
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

C. Tinjauan Tentang Sikap Disiplin

1. Pengertian Sikap

Menurut (Muhibbin Syah, 2016: 118), Sikap dalam arti yang sempit adalah pandangan atau kecenderungan mental. Menurut Bruno dalam (Muhibbin Syah, 2016: 118), sikap (attitude) adalah kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu. Dengan demikian, pada prinsipnya sikap itu dapat kita anggap suatu kecenderungan siswa untuk bertindak dengan cara tertentu.

Menurut Berkowitz dalam (Saifuddin Azwar, 2013: 5), sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Disamping itu sikap juga dapat didefinisikan sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif,

predis posisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respons terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan.

Menurut Secord dan Backman dalam (Saifuddin Azwar, 2013: 5), mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (kanasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.

Dari pendapat para ahli diatas mengenai sikap, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap merupakan suatu tindakan dari seseorang baik ataupun buruk, disengaja atau tidak disengaja yang diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya.

2. Pengertian Disiplin

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disiplin mempunyai arti ketaatan dan kepatuhan pada aturan, tata tertib dan lain sebagainya. Disiplin adalah kekuatan yang ditanamkan oleh para pendidik untuk menanamkan dalam jiwa tentang tingkah laku dalam pribadi murid dan bentuk kebiasaan dalam diri mereka, tunduk dan patuh dengan sebenarnya pada aturan-aturan yang sesuai dengan prinsip pendidikan yang sesungguhnya yaitu inti yang dijalankan pada setiap aktivitas sekolah.

Soegeng Prijodarminto, S.H. dalam buku “Disiplin Kiat Menuju Sukses” mengatakan: Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban.

3. Konsep Disiplin

Menurut (Nur Alifa, 2012), Konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan, atau norma dalam kehidupan bersama (yang melibatkan orang banyak). menyatakan bahwa disiplin adalah pengembangan mekanisme internal diri siswa sehingga siswa dapat mengatur dirinya sendiri. Istilah “disiplin” mengandung banyak arti, *Good’s Dictionary of Education* menjelaskan “disiplin” sebagai berikut :

- (1) proses atau hasil pengarahan atau pengendalian keinginan, dorongan atau kepentingan demi suatu cita-cita atau untuk mencapai tindakan yang lebih efektif,
- (2) pencarian suatu cara bertindak yang terpilih dengan gigih, aktif dan diarahkan sendiri, sekalipun menghadapi rintangan,
- (3) pengendalian perilaku dengan langsung dan otoriter melalui hukuman dan/atau hadiah,
- (4) pengekangan dorongan, sering melalui cara yang tak enak, menyakitkan.

4. Unsur-Unsur Disiplin

Hurlock dalam (Novi Handayani, 2014: 16-20) menjelaskan bahwa disiplin diharapkan mampu mendidik anak untuk berperilaku sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang ditetapkan oleh kelompok sosial tertentu, sehingga dalam setiap kelompok sosial harus mempunyai empat unsur pokok disiplin, yaitu peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi. Penerapan empat unsur disiplin tersebut berlaku untuk dewan guru dan semua siswa selama di lingkungan sekolah. Namun, dalam prakteknya implementasi kedisiplinan yang dilakukan kepala sekolah dan dewan guru lebih banyak

menerapkan unsur disiplin untuk siswa. Kemudian implementasi yang dilakukan sebagian guru di SMP Plus Al Amanah Sumbertlaseh sudah menerapkan semua unsur disiplin pada siswanya.

a. Peraturan

Peraturan adalah pola yang ditetapkan untuk setiap tingkah laku individu. Pola tersebut dapat ditetapkan oleh orang tua, guru atau teman bermain. Tujuan peraturan adalah membekali siswa bahwa setiap perilakunya disetujui dalam situasi tertentu. Hal lain seperti peraturan sekolah misalnya, peraturan memberi pengertian kepada siswa mengenai apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan sewaktu ia berada di dalam kelas, dalam koridor sekolah, ruang makan sekolah, kamar kecil ataupun di lapangan bermain sekolah. Selain itu, peraturan di rumah mengajarkan anak untuk melakukan apa yang harus dan apa yang boleh dilakukan saat di rumah seperti tidak boleh mengambil barang milik saudaranya, tidak boleh “membantah” nasihat orang tua dan tidak lupa untuk mengerjakan tugas rumah, misalnya menata meja, mencuci pakaian, membersihkan kamar dan lain-lain.

Peraturan mempunyai dua fungsi untuk membantu siswa menjadi bermoral. Pertama, peraturan mempunyai nilai pendidikan, karena siswa dikenalkan berbagai perilaku yang telah disetujui oleh anggota kelompok tersebut. Kedua, peraturan membantu mengekang perilaku atau tindakan yang kurang diinginkan oleh anggota kelompok. Agar fungsi peraturan tersebut dapat terwujud dan tercapai, maka peraturan harus dimengerti,

diingat, dan diterima oleh siswa untuk bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ada.

b. Hukuman

Hukuman dalam bahasa Inggris disebut punishment, berasal dari kata kerja Latin “punire” yang berarti menjatuhkan hukuman pada individu karena suatu kesalahan, pelanggaran atau perlawanan yang dijadikan sebagai balasan. Hukuman mempunyai tiga fungsi dalam perkembangan moral siswa. Pertama ialah menghalangi siswa. Fungsi ini menghalangi siswa untuk melakukan tindakan yang tidak disukai oleh masyarakat, sehingga anak akan mengurungkan niat untuk melakukan tindakan tersebut karena ia ingat akan hukuman yang pernah mereka rasakan di waktu lampau. Hal tersebut membuat anak merasa trauma akan hukuman yang akan diterima, apabila melakukan tindakan sama di masa lampau. Kedua ialah mendidik. Sebelum siswa mengetahui peraturan, maka mereka dapat belajar terlebih dahulu bahwa tindakan tertentu benar dan salah. Apabila tindakan yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh individu, ia akan menerima hukuman. Sebaliknya, apabila mereka melakukan tindakan yang diperbolehkan, ia tidak menerima hukuman. Ketiga memberikan motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima masyarakat. Motivasi terletak bagaimana siswa memutuskan sendiri mengenai tindakan salah atau benar yang harus dihindari dan dilakukan dalam lingkungan masyarakat.

c. Penghargaan

Penghargaan adalah suatu penghargaan yang diberikan atas dasar hasil baik. Beberapa orang tua atau orang lain merasa bahwa penghargaan tersebut dapat melemahkan motivasi anak untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sehingga banyak orang tua atau orang lain jarang menggunakan penghargaan dibandingkan hukuman.

Penghargaan mempunyai tiga fungsi dalam mengajarkan dan mendidik siswa untuk berperilaku sesuai dengan cara yang disetujui masyarakat. Pertama, penghargaan itu mempunyai nilai mendidik. Apabila tindakan siswa disetujui, maka mereka menganggap bahwa hal tersebut baik. Sebaliknya, apabila siswa melakukan tindakan yang tidak disetujui, maka mereka menganggap hal itu buruk atau kurang baik. Kedua, sebagai motivasi untuk mengulangi perilaku yang telah disetujui masyarakat secara sosial. Anak diberi kebebasan untuk mengulang perilaku yang telah disetujui masyarakat. Ketiga, berfungsi untuk memperkuat perilaku yang telah disetujui secara sosial dan bukan untuk melemahkan keinginan untuk mengulangi perilaku tersebut.

d. Konsistensi

Konsistensi adalah tingkat keseragaman atau stabilitas. Bila disiplin itu konstan, maka tidak akan ada perubahan untuk menghadapi kebutuhan perkembangan. Konsistensi mempunyai tiga fungsi penting. Pertama, ia mempunyai nilai mendidik yang sangat besar kepada siswa. Apabila peraturannya konsisten, ia akan memacu pada proses belajar. Artinya peraturan tersebut harus bersifat konsisten atau tetap.

Kedua, bahwa konsistensi mempunyai nilai motivasi yang kuat. Siswa memahami bahwa penghargaan selalu mengikuti perilaku yang disetujui atau baik, sedangkan hukuman selalu mengikuti pada perilaku yang dilarang. Ketiga, bahwa konsistensi mempertinggi penghargaan terhadap peraturan dan orang yang berkuasa.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur disiplin ini berfungsi membentuk kedisiplinan siswa melalui peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi yang dibentuk dalam kelompok sosial tertentu seperti di sekolah, rumah dan lingkungan masyarakat. Keempat unsur disiplin tersebut sangat penting untuk diterapkan dalam kelompok sosial, salah satunya di lingkungan sekolah. Maka dengan adanya penerapan kedisiplinan melalui empat unsur di atas dapat membantu pendidik dalam menanamkan sikap disiplin pada guru ataupun siswa sehari-hari. Selain itu, dapat menghindari terjadinya tindakan indiscipliner baik yang dilakukan guru maupun siswa di sekolah berkaitan dengan kedisiplinan. Penerapan unsur-unsur disiplin ini mempunyai penekanan dan fungsi masing-masing sehingga tenaga pendidik harus bekerja sama dengan masyarakat, orang tua, dan tenaga pendidik lainnya dalam menerapkan dan mengajarkan kepada siswa. Salah satu kegiatan untuk menerapkan kedisiplinan siswa adalah melakukan kegiatan di kelas yang di dalamnya mengandung empat unsur disiplin tersebut. Kegiatan guru mendisiplinkan siswa di kelas merupakan penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Selain di kelas, penerapan kedisiplinan dapat ditanamkan melalui kegiatan di luar kelas seperti kegiatan ekstrakurikuler yang

ada di sekolah tersebut. Oleh karena itu, pendidik harus bekerja keras dalam mendidik, membina, dan membentuk perilaku siswa sesuai dengan peraturan dalam kelompok sosialnya.

5. Fungsi Disiplin

Hurlock dalam (Novi Handayani, 2014: 21-22) menyatakan bahwa disiplin mempunyai dua fungsi yaitu bermanfaat dan tidak bermanfaat. Fungsi disiplin yang bermanfaat adalah sebagai berikut.

- a. Mengajarkan siswa bahwa setiap perilaku akan diikuti hukuman dan pujian.
- b. Mengajarkan kepada siswa mengenai tingkatan penyesuaian yang wajar, tanpa menuntut konformitas yang berlebihan kepada individu.
- c. Membantu siswa untuk mengembangkan pengendalian dan pengarahan diri sehingga memberi pengajaran dalam mengembangkan hati nurani mereka untuk dapat membimbing tindakan mereka.

Sedangkan fungsi disiplin yang tidak bermanfaat adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menakut-nakuti siswa setiap tindakan dan perilaku yang mereka lakukan.
- b. Sebagai pelampiasan agresi seseorang dalam mendisiplinkan orang lain.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi disiplin mempunyai manfaat yaitu memberi dan mengajarkan kepada siswa bahwa setiap perilaku selalu diikuti oleh hukuman maupun pujian. Selain itu, disiplin memberi manfaat untuk mengembangkan pengendalian diri siswa

berdasarkan hati nurani. Sedangkan fungsi disiplin yang tidak bermanfaat adalah sebagai cara untuk menakut-nakuti siswa setiap melakukan tindakan sehari-hari dan sekaligus sebagai pelampiasan agresi seseorang dalam mendisiplinkan orang lain.

Jadi, fungsi dari disiplin adalah mengajarkan kepada siswa bahwa setiap peraturan atau tata tertib selalu disertai oleh hukuman ataupun pujian. Penanaman disiplin siswa memberi pengajaran dan pendidikan untuk mengontrol sikap dan perilakunya sehari-hari. Oleh karena itu, dalam penelitian ini disiplin diharapkan dapat menciptakan siswa yang bermoral, berkarakter, disiplin dan patuh terhadap peraturan atau tata tertib di sekolah maupun di luar sekolah untuk dapat menciptakan generasi penerus bangsa Indonesia.

6. Cara Menanamkan Disiplin

Terbentuknya disiplin siswa dapat dilakukan dengan cara menanamkan disiplin kepadanya. Menurut Hurlock dalam (Novi Handayani, 2014: 22-24), mengemukakan bahwa cara-cara menanamkan disiplin ada tiga cara. Ketiga cara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Cara mendisiplinkan otoriter

Adanya peraturan yang keras memaksa siswa untuk berperilaku sesuai yang diinginkan, hal tersebut menunjukkan bahwa semua jenis disiplin itu bersifat otoriter. Disiplin otoriter berkisar antara pengendalian perilaku siswa yang wajar hingga kaku tanpa memberikan kebebasan bertindak, kecuali bila sesuai dengan standar yang direncanakan. Disiplin

otoriter berarti mengendalikan sesuatu dengan kekuatan eksternal dalam bentuk hukuman terutama hukuman badan.

b. Cara mendisiplinkan permisif

Disiplin permisif adalah sedikit disiplin atau tidak berdisiplin. Terlihat bahwa orang tua dan guru menganggap bahwa kebebasan (permissiveness) sama dengan laissezfaire yang membiarkan siswa meraba-raba dalam situasi sulit untuk dihadapi sendiri tanpa adanya bimbingan atau pengendalian dari orang lain.

c. Cara mendisiplinkan demokratis

Metode ini menggunakan penjelasan, diskusi, penalaran, dan pemikiran untuk membantu siswa mengerti mengapa perilaku tersebut diharapkan. Maka metode ini lebih menekankan pada aspek edukatif dari disiplin dibandingkan aspek hukumannya. Oleh karena itu, disiplin demokratis ini menggunakan penghargaan dan hukuman, tetapi penekanannya lebih besar pada penghargaan saja.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terbentuknya disiplin dilakukan dengan cara menanamkan disiplin kepada siswa. Pertama, disiplin otoriter, disiplin permisif, dan disiplin demokratis. Ketiga cara tersebut mempunyai tujuan masing-masing dalam memberikan pembelajaran dan pendidikan disiplin siswa. Disiplin otoriter ini dengan cara memberi perilaku wajar hingga kakukepada siswa. Disiplin permisif yaitu memberikan kebebasan siswa untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Sedangkan disiplin demokratis lebih menekankan pada penghargaan saja.

Ketiga cara tersebut merupakan cara bagi pendidik untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas selama berada di lingkungan sekolah. Tujuannya memberikan pengajaran dan pendidikan siswa agar dapat bersikap dan berperilaku disiplin, maka mereka wajib menaati peraturan atau tata tertib yang ada dengan sebaik mungkin. Sekolah mempunyai kewajiban menerapkan atau menanamkan disiplin di sekolah atas dasar empat unsur disiplin yaitu, peraturan, hukuman, penghargaan, dan konsistensi dengan cara otoriter, permisif, dan demokratis. Maka penerapan kedisiplinan sekolah akan berjalan dan siswa terbiasa bersikap disiplin sekaligus dapat membedakan mana tindakan baik dan buruk yang harus dilakukan.

7. Jenis Gangguan dan Cara Penanggulangan Disiplin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa gangguan adalah halangan yang berasal dari luar untuk mempengaruhi setiap perilaku dan tindakan individu. Beberapa gangguan disiplin dan cara penanggulangan gangguan disiplin seperti yang dikemukakan oleh Hollingsworth dan Hoover dalam (Novi Handayani, 2014: 24-27) adalah sebagai berikut:

a. Gangguan percakapan

Percakapan antara siswa di kelas dapat mengancam kedisiplinannya. Hal tersebut harus segera ditanggulangi yaitu guru dapat segera menyapa atau menghampiri mereka dengan memberikan motivasi atau pertanyaan terkait dengan materi pelajaran.

b. Gangguan melempar catatan

Gangguan melempar catatan muncul akibat siswa mengalami kebosanan pada kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga melempar catatannya. Contohnya saat siswa mengalami kebosanan dan guru membaca catatan dengan keras-keras, maka hal tersebut akan merugikan diri siswa dan sekaligus mengganggu ketertiban atau kedisiplinan siswa di dalam kelas.

c. Gangguan kebebasan berlebih diantara siswa

Bebas adalah nurani manusia, tetapi kebebasan yang berlebihan perlu adanya pencegahan agar tidak merusak disiplin di dalam kelas. Cara pencegahan tersebut dapat dilakukan guru dan siswa dengan melakukan tanya jawab mengenai hak dan kewajiban. Maka, guru harus memberikan penjelasan kepada siswa bahwa di dalam hak terdapat kewajiban untuk tidak mengganggu orang lain.

d. Gangguan menyontek

Menyontek dapat terjadi akibat ketidaksiapan siswa atau disebabkan oleh materi yang banyak. Menyontek adalah perbuatan yang disebabkan tidak belajar untuk melakukan persiapan belajar yang cukup. Pendidik perlu memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar dengan rajin dan tekun.

e. Gangguan pengaduan

Disiplin di kelas terganggu karena adanya pengaduandan laporan dari siswa. Guru harus dapat membedakan pengaduan dan laporan mengenai

suatu hal, sehingga guru dapat bertindak bijaksana dan konsisten dalam menjalankan setiap hak dengan adil dan baik.

f. Gangguan perpindahan situasi

Perpindahan situasi merupakan gangguan disiplin di kelas seperti berganti mata pelajaran, pindah kelas, dan perubahan jadwal. Oleh karena itu, perlu adanya kesiapan alternatif lain dan pengawasan yang baik agar perpindahan situasi tersebut tidak mengganggu disiplin siswa di kelas.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan siswa di kelas dipengaruhi oleh berbagai gangguan seperti gangguan percakapan, melempar catatan, kebebasan yang berlebihan diantara siswa, menyontek, pengaduan, dan perpindahan situasi. Apabila gangguan tersebut tidak dapat di atasi oleh guru akan mempengaruhi sikap kedisiplinan siswa di kelas dan membuat kondisikelas menjadi kurang kondusif. Oleh karena itu, seorang guru harus bekerja sama dengan orang tua siswa dalam meningkatkan sikap dan perilaku disiplin.

Menerapkan dan membina sikap disiplin dimulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang baik, harmoni, dan nyaman akan membawa energi positif tersendiri dari pribadi siswa tersebut. Energi positif itu dapat membawa siswa bersemangat dalam melaksanakan proses belajar dan akan memiliki sikap mental yang patuh, taat, tertib dalam mematuhi semua norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah.

Usaha-usaha tersebut harus dilakukan pendidik secara maksimal dan terarah, sehingga dalam menerapkan sikap dan nilai-nilai disiplin di lingkungan sekolah selalu dipatuhi dan ditaati oleh semua siswa. Semua usaha tersebut dapat membiasakan anak untuk bersikap dan berperilaku disiplin di lingkungan sekolah dan masyarakat sekaligus dapat mengatasi persoalan-persoalan siswa yang tidak disiplin di kelas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang disajikan berupa kata-kata. Dilihat dari permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Lexy J. Moleong, (2016: 6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks secara alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi nilai-nilai pancasila terhadap sikap disiplin pada siswa SMP Plus Al Amanah Sumbertlaseh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperanserta, artinya dalam

proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun. pendapat ini di kemukakan oleh Lexy J. Moleong, (2016: 168).

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan disalah satu sekolah SMP yang bertempat di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yaitu SMP Plus Al Amanah.

D. Sumber Data

Menurut (Wiratna Sujarwean, 2014: 73) sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Sedangkan menurut Lofland dalam (Lexy J. Moleong, 2016: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/ audio, pengambilan foto atau film.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber dari siswa atau menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui wawancara peneliti dengan nara sumber dan melakukan pengamatan. Dari penelitian ini peneliti mengambil sumber data melalui siswa SMP Plus Al Amanah Sumbertlaseh.

Dalam penelitian ini, sumber data menggunakan sampel purposif (Purposive Sampel) yang memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus studi yang bersifat mendalam (Nana Syaodih,

2007: 101). Maka dari itu peneliti hanya mengambil 20 siswa untuk dijadikan informan dalam penelitian ini agar peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam dan lebih jelas lagi dibandingkan dengan mewawancarai semua informan oleh karena itu peneliti hanya menetapkan atau memilih 20 siswa yang dijadikan informan sesuai pendapat dari Nana Syaodih.

Dari jumlah siswa kelas VII-A, VII-B, VII-C, dan VII-D peneliti hanya mengambil 20 siswa untuk dijadikan informan dalam memilih informan peneliti mengacak empat kelas tersebut dan setelah diacak peneliti memilih 20 siswa dengan cara melihat daftar hadir siswa dari situ peneliti memilih 20 siswa dari 101 siswa karena peneliti ingin memfokuskan dalam mencari data sehingga peneliti hanya mengambil sampel 20 untuk dijadikan informan sesuai pendapat dari Nana Syaodih yang memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus studi yang bersifat mendalam.

Berikut jumlah populasi dan sampel yang digunakan peneliti dalam mencari data di SMP Plus Al Amanah Sumbertlaseh :

Tabel 3.1 Daftar Siswa Kelas VII – A

NO	NAMA	L/P	Keterangan
1	A. ICHLASH PRASETIYO ADI N.	L	
2	ADI ARYA FEBRIAN SAPUTRA	L	
3	AFIM MASAMIN	L	
4	AFRIZA	L	
5	AGUS BASYARUDDIN MUNIP	L	
6	AH CHOIRIL HABIB	L	
7	AH CHOIRIL HUDA	L	

NO	NAMA	L/P	Keterangan
8	AHMAD ABDUL LATIF	L	
9	AHMAD AZIZ AL MUZAKI	L	
10	AHMAD FATKUR ROZI	L	
11	AHMAD QOMARUDIN	L	
12	ALMU'IS LIDDINILLAH	L	
13	AZRIL AL-AVRIZA	L	
14	DAZTIN AZ ZIKRA	L	
15	DIMAS BAYU PRAYOGA	L	
16	EKO WAHYUDI	L	
17	ENDRA FEBIYANTO	L	
18	ENGGA WISNU PRATAMA	L	
19	FAHIM ARJUNA WICAKSANA	L	
20	FIRMAN NUSANTARA AJI	L	
21	ILHAM AFDIANA	L	
22	ILYAS FIRMANSAH	L	
23	ISMA KHOIRUN NIVA	L	
24	ISMAIL ALI MUKHAROMAH	L	
25	JAUHARUL MAWAHIB	L	
26	M. ABDUL ROUF	L	
27	KHOIRUL WAFA	L	

Tabel 3.2 Daftar Siswa Kelas VII – B

NO	NAMA	L/P	Keterangan
1	M. ADI PRASETIYO	L	
2	M. ALI MUSTOFA	L	
3	M. JAMALUDIN	L	
4	M. NOVAL ARDHIAN AFFANDI	L	
5	M. TAMAM MUDIN ADA RUQUD	L	
6	MIFTACHUL MAHFUD	L	
7	MOH. IRFAN AMIRUL CHUSNA	L	
8	MOH. PUJANTORO	L	
9	MOHAMMAD ALFAN KHOIRI	L	
10	MOHAMMAD HAFID	L	
11	MUAMAR KHADAFI	L	
12	MUFADIN	L	
13	MUFAHIN	L	
14	MUHAMMAD ABDUL MAJID A.	L	

NO	NAMA	L/P	Keterangan
15	MUHAMMAD ARIFIN JUNAIDI	L	
16	MUHAMMAD ISHAQ MUBAROK	L	
17	MUHAMMAD IZZUDIN IHSAN	L	
18	MUHAMMAD MUSLIKHIN	L	
19	MUHAMMAD RAFI	L	
20	NANDA TAUFIQUR ROHMAN	L	
21	QOIRUMAN ALI	L	
22	RENO HERI SASONO MURTI	L	
23	RIZKI MAULANA AKSAN	L	
24	SETIONO	L	
25	SIGIT EKA PUTRA	L	
26	TAUFIQUR ROHMAN	L	
27	UMAR MOCHTAR	L	
28	YUHONO MUHAMMAD KRISNA S.	L	

Tabel 3.3 Daftar Siswa Kelas VII – C

NO	NAMA	L/P	Keterangan
1	AINUN MARDIYAH	P	
2	ALFIA NURUL RAMADANI	P	
3	ALIFIA DIAN RAMADANI	P	
4	ANDINA CESYA PRAMESTI	P	
5	ANGGI AMELIAN PUTRI	P	
6	ANIK MARIYATUN NASIKHAH	P	
7	ASFIA LAILATUN NI'MAH	P	
8	ATIKA NEYSA PUTRI	P	
9	AULIA SHINFANA	P	
10	AULIYA ANGGUN PRAMESTI	P	
11	CHABIBATUM MUNAWAROH	P	
12	DESY ARIYANTI	P	
13	HAWA NUR AWALUN NISA'	P	
14	HILDA NUR FITRIA	P	
15	IKA RAHMALIA ANJANI	P	
16	ILAINATAZKIROH	P	
17	IRMA WATI	P	
18	ISTI KHOMATUS SOLIKAH	P	
19	KHOLIFATULLAH SAIDA MUBAROK	P	

20	KURNIA EKA AULIA DEWI	P	
21	LAILATUL ISRINAH NISWATUN K.	P	
22	LUM'ATUL KHOIROTIN NISA	P	

Tabel 3.4 Daftar Siswa Kelas VII – D

NO	NAMA	L/P	Keterangan
1	MIFTACHUS SIFA	P	
2	MUARIFA	P	
3	NADIA AVINKA	P	
4	NADYA NURIN NAJATIL ULYA	P	
5	NAFISAH NOR KHOLIDAH	P	
6	NAILA RIFATUT TAKHIYAH	P	
7	NAYLA NUR ROSIDAH	P	
8	FADHILATUL INAYAH	P	
9	NURUL ALFIATUL RIZKIYAH	P	
10	NURUL ROSSA LIA	P	
11	PEBRI NUR KHUSNUL QOTIMAH	P	
12	PUTRI AULINA REGITA	P	
13	RISKAWATI	P	
14	ROSA VALENTINA	P	
15	SEPTIA SYAFA'ATUL AWALIYAH	P	
16	SILVIANA ROMANDANI	P	
17	SITI AMINATUS ZURIYA	P	
18	SITI AYU WULANDARI	P	
19	SITI FAZZATUL MAGHFIROH	P	
20	SITI NINGRUM	P	
21	STEVIA AYU NUR FITRIANI	P	
22	SYAHIRA RAMADHANI AL HUSNA	P	
23	ULFA KHASANAH	P	
24	ZHELIA ALBACHITA SUDIBYO	P	

E. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan prosedur-prosedur pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode.

1. Wawancara (*Interview*)

(Moleong, 2016: 186) mendefinisikan wawancara sebagai suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sedangkan (Sugiyono, 2009: 137) menjelaskan bahwa wawancara digunakan oleh peneliti apabila ingin melakukan studi pendahuluan dari suatu penelitian, untuk menemukan suatu permasalahan yang harus diteliti, digunakan apabila ingin mengetahui hal-hal responden yang mendalam, dan selanjutnya dari jumlah respondennya yang sedikit/kecil.

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, dengan alasan jenis wawancara ini tergolong dalam kategori interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka sehingga peneliti dapat menambah pertanyaan di luar pedoman wawancara untuk mengungkap pendapat dan ide-ide dari responden. Informan dalam wawancara ini ialah guru, dan siswa.

2. Pengamatan (*Observasi*)

(Sugiyono, 2015: 145) menyatakan bahwa observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik dibandingkan teknik pengumpulan data lain. Observasi tidak selalu terbatas pada orang saja melainkan pada obyek-obyek alam lain seperti keadaan lingkungan yang ada di sekolah-sekolah. Sedangkan menurut (Wiratna Sujarwean, 2014: 32) menjelaskan bahwa observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.

Peneliti ini menggunakan observasi nonpartisipan dalam pelaksanaan dan segi instrumennya menggunakan observasi terstruktur. Observasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang situasi umum dari objek yang diteliti, yaitu implementasi nilai-nilai pancasila terhadap sikap disiplin pada siswa SMP Plus Al Amanah Sumbertlaseh.

3. Dokumentasi

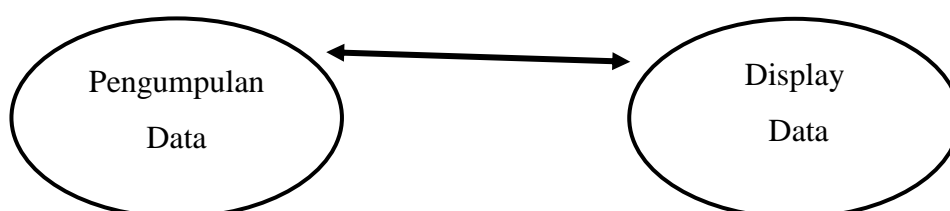
(Wiratna Sujarwean, 2014: 33) studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data

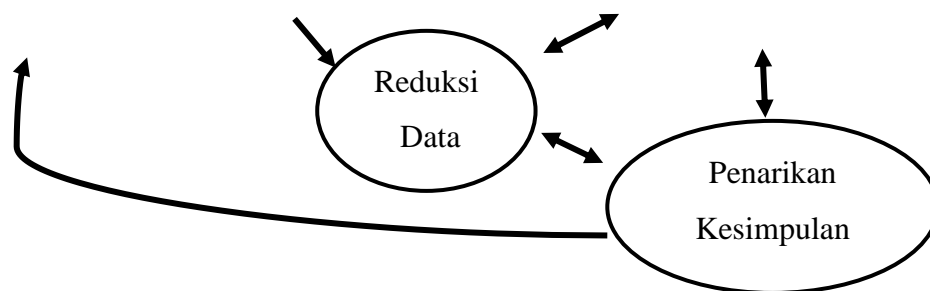
tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (Lexy J. Moleong, 2016: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017: 337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yakni reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini adalah gambar skema analisis data dan penjelasan lebih lanjut model analisis data menurut Miles dan Huberman.





Sumber: Sugiyono (2017:338)
gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data oleh Miles dan Huberman

1. Reduksi data

(Sugiyono, 2017: 338) menjelaskan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Selama masa pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data-data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dipilah sesuai dengan kategori masing-masing agar lebih rinci dan mudah diolah. Peneliti memilah-milah data yang berupa kedisiplinan siswa, upaya penerapan sikap disiplin pada siswa, faktor pendorong dan penghambat penerapan sikap disiplin pada siswa, serta hasil observasi proses penerapan nilai-nilai pancasila yang berkaitan dengan sikap disiplin siswa. Data yang diperoleh tersebut merupakan data yang masih kompleks.

Kemudian peneliti melakukan reduksi data dengan cara mengambil yang pokok dan penting, serta membuang data yang

dianggap tidak diperlukan. Misalnya saat wawancara dengan guru dan siswa ada jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti dalam pedoman wawancara, maka jawaban itu tidak dipakai. Kemudian apabila jawaban dari siswa terlalu luas maka akan diambil inti dari jawaban tersebut saja.

2. Penyajian data

(Sugiyono, 2017: 341) mengemukakan bahwa dalam melakukan penyajian data, dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, flowchart, bagan, dan sejenisnya. Peneliti menyajikan data yang berupa upaya penerapan sikap disiplin pada siswa, serta hasil observasi proses penerapan nilai-nilai pancasila yang berkaitan dengan sikap disiplin siswa . Dalam penelitian ini, data tersebut disajikan secara deskriptif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sering juga disebut tahap verifikasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Data-data mengenai upaya penerapan sikap disiplin pada siswa, faktor pendorong dan penghambat dalam penerapan sikap disiplin pada siswa, serta hasil observasi proses penerapan Nilai-nilai pancasila yang berkaitan dengan sikap disiplin siswa yang telah dikemukakan pada penyajian data diinterpretasikan kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, (2017: 366) uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (objektifitas). Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data.

Sugiyono, (2017: 368) menjelaskan bahwa uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Pengujian kredibilitas dalam penelitian ini digunakan triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan member check.

Triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan menggali informasi dari siswa lalu triangulasi ke guru. Data dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana yang memiliki pandangan sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari sumber yang sama yaitu guru. Jika hasil kroscek ketiganya saling terkait maka data dapat dipercaya kebenarannya. Kemudian peneliti juga melakukan perpanjangan pengamatan yakni peneliti tidak hanya mengobservasi kegiatan dalam sekolah sekali saja. Peneliti juga menggunakan member check dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh disepakati oleh pemberi data, maka data tersebut valid.